

PERENCANAAN POLITIK PERKOTAAN : SEBUAH KAJIAN PUSTAKA TERSTRUKTUR (A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW)

Rizky Bagastian Salahudin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Malang
Pos-el: bagastianrizky7@gmail.com

Abstract:

This study aims to explain in general about urban political planning. This study uses a descriptive method and this study explains that in the urban political planning process, which aims to create cities and human settlements that are inclusive, safe, resilient and sustainable and can attract attention. However, what needs to be considered is the urban management system in realizing sustainable development. In public or political affairs, there needs to be civic involvement from institutions in participation that is not too formal and has an impact on the local space. For example, reforestation projects have emerged to address issues such as climate change or interventions in urban planning and institutions. However, is this the case? How does the community play a role in the public sphere and how does it relate to the role of local administration? Meanwhile, the role of non-governmental organizations and other groups acts as a mediator in the process of facilitating civil action. However, what are the residents' views on this facilitator? Government departments, related agencies, national and international non-governmental organizations, professional institutions, academics and independent experts. There is a need for a collaborative approach and a backcasting approach to develop the actionable outcomes needed to deliver transformative change in society.

Keywords: politics, urban; governance, stakeholders, development, civil society, smart city

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara umum tentang perencanaan politik perkotaan, Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan politik perkotaan yang bertujuan menciptakan kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan serta dapat menarik perhatian. Namun, Yang perlu diperhatikan adalah sistem tata kelola perkotaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Dalam urusan publik atau politik perkotaan, Perlu adanya keterlibatan sipil dari kelembagaan ke dalam partisipasi yang tidak terlu formal dan berdampak pada ruang publik. Misalnya, Proyek penghijauan yang telah muncul untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim atau intervensi dalam perencanaan dan kelembagaan kota. Namun, Apakah ini masalahnya? Bagaimana masyarakat berperan dalam ruang publik dan bagaimana kaitannya dengan peran administrasi lokal? Perlu ada bentuk kolektif kolegal antara departemen pemerintah, Instansi terkait, Organisasi non pemerintah nasional dan internasional, Lembaga profesi, Akademisi dan Ahli independen secara kolaboratif untuk mencari solusi terbaik sehingga dapat dikembangkan dan di tindaklanjuti yang sekiranya diperlukan demi memberikan perubahan transformatif di masyarakat.

Kata kunci: politik; perkotaan, tata kelola; pemangku kepentingan; pembangunan; masyarakat sipil; kota pintar

Pendahuluan

Kebutuhan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dewasa ini sudah sangat mudah karena telah terfasilitasi oleh kehadiran teknologi yang terkomputerisasi. Fasilitas ini memudahkan khususnya bagi kalangan mahasiswa untuk memperoleh informasi maupun kebutuhan penelitian sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu kebutuhan itu adalah karya tulis ilmiah, Mengolah karya tulis ilmiah ini berupa menganalisis atau mengulas kemudian dijadikan sebagai metode dalam menciptakan karya ilmiah yang baru berdasarkan penelitian atau data-data yang telah ada. Adapun tujuan dari mengolah suatu karya ilmiah ini sejatinya untuk memberikan informasi gambaran atau gagasan di sebuah karya tulis ilmiah, artikel maupun jurnal.

Pada tulisan ini, Penulis menganalisis dari beberapa penelitian-penelitian terdahulu dengan tema "Perencanaan Politik Perkotaan". Penelitian ini merujuk pada ciri sebuah wacana politik tentang pembangunan perkotaan, Sebab dalam pembangunan perkotaan, pemerintah kota adalah pihak yang bertanggung jawab dan aka menguji keberhasilannya dibawah kepemimpinannya serta layak atau tidaknya mendapatkan Publik Trust dari masyarakat sipil. Suatu pembangunan perkotaan akan menciptakan bias terhadap sumber daya manusia, sumber daya alam, kesejahteraan, fasilitas perkotaan, pelayanan publik, tata kelola lingkungan hidup, keamanan dan kenyamanan masyarakat perkotaan sehingga hal tersebut adalah muara untuk menciptakan nilai-nilai positif terhadap aspek-aspek tersebut.

Proses perencanaan politik perkotaan ini perlu untuk merangkul beberapa pihak seperti elemen masyarakat, Swasta, Organisasi non pemerintah, Pengawasan anggaran dan sebagainya. Sebuah perencanaan politik perkotaan tanpa ada keterlibatan unsur-unsur diatas akan melahirkan sirkulasi buruk bagi demokrasi. Selain itu, Kualitas perencanaan politik perkotaan yang sehat adalah terhindar dari praktik ilegal berupa maladministrasi, korupsi, perusakan alam dan sebagainya.

Dalam proyeksi kota-kota dunia yang baru banyak sekali menampilkan keragaman baik secara penampilan, pertumbuhan, dan kinerja. Hal ini didasari karena adanya kesadaran yang tumbuh bahwa potensi pengembangan perkotaan erat dengan kondisi keselamatan dan keamanan di kota-kota tersebut (Kourtit et al., 2021), Kota sendiri adalah mesin pertumbuhan kekayaan nasional dan produksi pendapatan, Kendati berapapun penduduk kota dan menciptakan populasi yang kumuh. Namun, Keberadaan permukiman kumuh di dalam perkotaan merupakan masalah yang menantang dalam perencanaan kota (Islam et al., 2021). Dewasa kini, Area hijau merupakan komponen penting dari konsep kota-kota kontemporer karena area hijau memberikan dampak positif terhadap iklim, ekologis, ketahanan struktur perkotaan dan baik bagi penghuninya ditengah lajunya pertumbuhan populasi perkotaan dan urbanisasi yang mengancam pada ruang hijau yang ada (Dudzić-gyurkovich, 2021).

Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kepadatan kota, Perlu adanya infrastruktur penghijauan perkotaan semakin penting. Namun Mempertahankan dan memaksimalkan penghijauan perkotaan di kota-kota yang padat merupakan tantangan

tersendiri bagi pemerintah. Maka, Pemerintah perlu membuat pengembangan dan implementasi kebijakan guna menjaga kualitas dan kuantitas ruang hijau di ruang publik ini agar dapat berkelanjutan (Bush et al., 2021). Area hijau perkotaan dapat memberikan berbagai manfaat bagi ekologi perkotaan selain memberikan kelembapan, menyerap polutan dan erosi tanah. Area hijau perkotaan juga dapat memberikan dampak baik bagi psikologis dan fisik bagi masyarakat serta menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan (Zambrano-Monserrate et al., 2021).

Banyak kota yang memiliki masalah terkait kesehatan karena salah satunya disebabkan strategi perencanaan kota yang tidak efektif, Penggunaan fasilitas olahraga berpeluang memperbaiki kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Penting bagi pemerintah dalam pengadaan spasial olahraga guna mencerminkan masalah kesehatan perkotaan (Jing et al., 2021). Salah satu tujuan penataan kota kontemporer adalah mewujudkan kota cerdas, Fakta ini menjadi bagian dari permasalahan kota yang mendesak untuk diselesaikan karena melihat dari latar belakang faktor-faktor yang terlihat dan tidak terlihat yang menyebabkan perubahan perkotaan secara berbeda beda (Nahiduzzaman et al., 2021)

Dalam perlombaan atas pengembangan kota pintar di seluruh dunia guna mempercepat penggunaan internet dan teknologi informasi untuk menjawab tantangan tata kelola, meningkatkan efisiensi dan memberdayakan penduduk (Mondschein et al., 2021). Proses tata kelola dan pengambilan keputusan pada sistem kota pintar akan semakin bergantung pada metode berbasis data guna meningkatkan

efisiensi operasional dan perencanaan kota. Namun, Terdapat bias pada sistem ini yaitu penggunaan sistem kota pintar mendapatkan perhatian yang relatif terbatas. hal ini perlu diperbaiki dengan memperhatikan aspek penting dari kota pintar dan perlu ditangani serta dipertanggungjawabkan dalam penggunaan teknologi dan alat data yang baru (Kontokosta & Hong, 2021). Adapun bias lainnya, Fenomena kota pintar mengundang cerminan kritis antara teknologi dan demokrasi terkait kepercayaan pada mekanisme dan tata kelola kota pintar mengenai permasalahan yang ada di ruang publik (Hartley, 2021).

Tidak lupa dalam perencanaan politik perkotaan penting untuk menerapkan nilai-nilai Demokrasi, Dalam urusan publik keterlibatan masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi yang tidak formal dari jalur kelembagaan yang berdampak langsung pada ruang publik. Misalnya, Mengintervensi suatu perencanaan dan praktik kelembagaan kota. Juga, Organisasi non pemerintah dan kelompok lain penting bertindak sebagai mediator dalam proses memfasilitasi aksi sipil (Brazeau-Béliveau & Cloutier, 2021), Rekomendasi untuk intervensi dalam sistem sosial-ekologi yang begitu kompleks karena memiliki jangkaun lintas sektoral sehingga memerlukan banyak kelompok perubahan guna kepentingan masyarakat dan lingkup aktivitas tertentu (Everard et al., 2021)

Kajian Pustaka

A. Perencanaan Perkotaan

Perencanaan perkotaan adalah salah satu bentuk strategi untuk mencapai suatu tujuan kebijakan yang keberlanjutan dalam sosial perkotaan. Namun, Dalam proses

realisasi sering kali dihadapkan oleh sejumlah tantangan tak terkecuali benturan kepentingan dan tujuan yang muncul di dalam proses perencanaan (Stepanova & Romanov, 2021). Perihal perencanaan infrastruktur, Krisis infrastruktur bukan hanya sekedar masalah teknis yang harus dipecahkan oleh para insinyur tetapi perlu untuk menghadirkan baik dari aspek tantangan sosial, ekologi, keuangan, dan politik. Oleh karenanya, Untuk mengatasi masalah infrastruktur dengan demikian akan memerlukan proses perencanaan yang kuat berupa pemeriksaan infrastruktur pendukung sistem sosial dan ekologi (Matsler et al., 2021).

Bagi (Pietta & Tonomi, 2021) Menata kembali kota, menghubungkan kembali perencanaan kota dan alam dan meningkatkan keberlanjutan itu berarti memperhitungkan kembali nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati melalui pendekatan sosial terhadap alam dan mempertimbangkan kembali bahwa alam sebagai produk sosial serta mengkaji kembali hubungan kota dan alam. Selain itu, Keadilan sosial-ekologis adalah aspek yang muncul untuk mendukung agensi alam, kesadaran sosial-ekologis, pengakuan kemampuan alam, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Perspektif keadilan sosial-ekologis serangkaian analisis yang menggambarkan dampak lingkungan kepada manusia terhadap pengakuan kompleksitas sosial-ekologis. Namun, membawa perspektif ini ke perencanaan kota memerlukan serangkaian metode dan alat dengan metode perencanaan yang tidak membahas masalah keadilan sosial-ekologis sebelumnya (Pineda-Pinto et al., 2021).

Kehadiran kota pintar adaah perkembangan logis yang alami dari

aglomerasi tradisional manusia akibat konsekuensi dari revolusi 4.0 serta perluasan teknologi informasi atas komunikasi, Sejatinya kota pintar harus bergantung pada pembangunan dan pengembangan identitas lokas yang didasarkan oleh fitur-fitur unggulan yang kuat melalui implementasi jangka panjang penduduk dan pemangku kepentingan lainnya (Grebosz-Krawczyk, 2021). Kota pintar merupakan paradigma perkotaan baru dan fenomena hegemonik atas perkembangan kota dewasa kini. Konsep ini adalah gambaran sempurna terkait data dan efesiensi kebutuhan kota yang serba otomatis. Namun, konsep ini pun diciptakan dengan membawa dua kelemahan. Pertama, ada dikotomi yang kuat dari solusi dan sistem, yang berkembang di pasar vertikal untuk energi, transportasi, tata kelola, keselamatan dan sebagainya. Kedua, terdapat dampak yang rendah yaitu beberapa peningkatan efisiensi, beberapa pengurangan biaya, waktu yang diperoleh, beberapa penurunan emisi CO2. Ada pun kesenjangan pengetahuan terkait pengembangan sistem kota pintar lintas sektoral yang berdampak tinggi (Komninos et al., 2021).

Selain itu, Terdapat dua hal yang paling mencolok dari konsep kota pintar yaitu sentralitas teknologi sebagai pendorong perubahan serba terdigitalisasi dan ketidakberadaan non visual secara langsung, kota pintar direpresentasikan sebagai kota mampu memecahkan masalah sosial yang begitu kompleks melalui algoritme dan inovasi teknis (Odendaal, 2021). Sehingga, Dengan berkembangnya teknologi yang berorientasi komputer big data maka kebutuhan masyarakat akan kota pintar berangsur-angsur meningkat. Pembangunan kota pintar mestinya nya tidak hanya memberikan “pintar” terkait hal-hal yang

ada di kota saja, tetapi perlu juga untuk memperhatikan peningkatan kualitas orang-orang di kota (Xiao & Xie, 2021).

A. Politik Perkotaan

Peran politik sejatinya sangat kuat untuk mempengaruhi perencanaan wilayah dan kota. Karena terdapat proses depolitisasi yang mengarah pada tatanan sosial yang konsensual dan transformatif. Untuk itu perlu adanya pembimbingan ulang atau berupa urutan politik (politisasi, depolitisasi dan re-politisasi) yang akan menjadi dasar empiris dan menjadikan konsensus sebagai bagian dari politik (Audikana, 2021). Mengenai proses pembangunan keberlanjutan perkotaan perlu adanya kombinasi strategis selektivitas struktural, diskursif, teknologi, dan kelompok yang mumpuni dalam skala proyek pembangunan perkotaan karena mengingat adanya posisi dalam tata kelola perkotaan dan beberapa aktor yang mampu memajukan proyek perkotaan (Chung & Xu, 2021).

Dalam penelitian (Zhao et al., 2021) Di Cina sedang terjadi pembaruan perkotaan dimana masyarakat desa telah mapan dan paham akan kuatnya konstruksi media resmi dalam melakukan protes secara vertikal dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka serta telah menemukan bahwa terdapat pembaruan perkotaan tidak hanya terkait secara fisik atau sosial tetapi terkait secara politik karena terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode konstruksi wacana operasional kekuasaan yang berbeda. Untuk mengatasi konflik-konflik ini, sistem pengetahuan wacana di desa-desa perkotaan harus dibendung sehingga pemerintah Cina dapat lebih efektif mengatur ruang-ruang sosial yang kompleks ini. Hal demikian dikarenakan, Siklus regenerasi politik perkotaan Cina memiliki

hubungan yang tangguh antara permintaan sosial dan respons pemerintah yang berasal dari struktur kekuasaan asimetris yang kuat (Yao et al., 2021).

Pemberdayaan sebagian dan dirasakan dalam partisipasi publik secara luas di seluruh China sejak akhir 1990-an sampai sekarang, semestinya warga negara menikmati hak atas partisipasi, informasi, dan kesetaraan formal tetapi hal-hal tersebut dibatasi oleh negara tanpa ada hak untuk memilih dan memberhentikan pejabat di sana (Qin & He, 2021). Partisipasi publik dalam menentukan keputusan, mendapatkan legitimasi, dan membangun kapasitas untuk pengambilan keputusan dan manajemen risiko memiliki catatan yang beragam. Partisipasi publik telah berkembang di Amerika Serikat ad tiga kekuatan yang memiliki dampak signifikan pada praktik partisipasi publik ini diantaranya adanya penekanan yang muncul pada pertimbangan demokratis, terjadi transisi dari pemikiran dikotomis tentang sains versus politik ke dalam perspektif terintegrasi, dan pengakuan bahwa berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan membawa kontribusi yang valid. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan berisiko akan berdampak pada hilangnya kepercayaan terhadap institusi dan individu oleh dinamika sosial-politik yang luas yang dapat melemahkan nilai dan proses demokrasi. (Webler & Tuler, 2021).

Bagi (Poelzer & Yu, 2021) demi mencapai keberhasilan yang merupakan salah satu tujuan utama pejabat publik maka perlu untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi. Karena semakin besar kesesuaian antara perspektif pemerintah dan warga negara, semakin besar legitimasinya. Untuk itu, Kesepakatan dan

partisipasi publik yang mengakar kuat dalam regenerasi masyarakat dengan dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan dan pemangku kepentingan pihak ketiga seperti warga lokal, kelompok social dan cendekiawan yang berkontribusi terhadap keberhasilan regenerasi masyarakat setempat secara keseluruhan. Implikasinya adalah adanya nilai yang besar untuk perencanaan masyarakat dan perencanaan harus melakukan tindakan yang sekiranya diperlukan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat yang memburuk (Hui et al., 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa artikel ilmiah yang berkaitan langsung dengan perencanaan politik perkotaan, Artikel yang berkaitan dengan tema tersebut berbasis jurnal yang telah di publikasikan di jurnal internasional. Artikelreview tersebut diarahkan untuk mengkonseptualisasikan kajian perencanaan politik perkotaan. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui pertanyaan-pertanyaan sebafei berikut, yaitu: 1) Apa tema yang dominan atau yang berkaitan dalam perencanaan politik perkotaan? 2) Apa saja topik yang berkaitan dengan studi perencanaan politik perkotaan? 3) Jenis pemetaan apa yang digunakan dalam perencanaan politik perkotaan? 4) Konsep apa yang dapat digunakan dalam studi perencanaan politik perkotaan?

Pertanyaan tersebut akan dijelaskan berdasarkan topik kajian, kerangka kerja, dan temuan peneliti sebelumnya yang terindeks dalam database Scopus. Artikel yang akan di review dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan seperti, pencarian artikel dan pemetaan topik.

Beberapa artikel yang berkaitan dengan tema perencanaan politik perkotaan

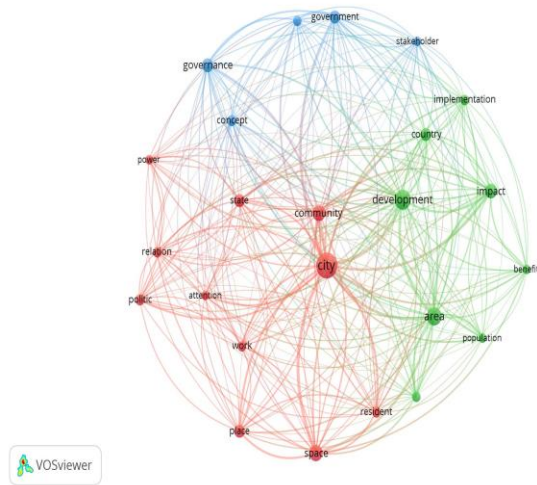
didapatkan melalui cara berikut: Pertama, mengidentifikasi artikel. Hal tersebut dilakukan dengan cara memasukkan kata kunci (Planning Urban Politics) pada kolom pencarian (Search) menggunakan kisan Pencarian Artikel Pemetaan Topik Pembahasan Analisis topik Konsep pembahasan tentang perencanaan politik perkotaan. Pencarian artikel tersebut 43606 yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kedua, memverifikasi berbagai artikel yang telah ditemukan sehingga dapat mengerucut pada artikel yang benar-benar berkaitan untuk menyusun kajian terkait, Verifikasi yang telah dilakukan menghasilkan artikel yang berjumlah 93 berdasarkan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, dari angka tersebut di verifikasi kembali dan menyisakan 56 artikel yang benar-benar memiliki keterkaitan dengan pembahasan

Hasil dan Pembahasan

1. Keterkaitan dan Pengelompokan Tema dalam Perencanaan Politik Perkotaan

Pada bagian ini, konsep dijelaskan dalam beberapa visualisasi terkait dengan tema penelitian ini, dan 56 di antaranya diidentifikasi dalam 93 artikel. Lebih lanjut, hasil review mereka dengan VOSviewer mengungkapkan bahwa terdapat tiga kelompok konsep. Gambar 1 menunjukkan nama-nama konsep yang diturunkan dari tampilan kepadatan cluster. Selanjutnya kode warna yang digunakan masing-masing digunakan untuk melihat daftar konsep yang menonjol dari masing-masing cluster. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin tema yang sering dibahas dalam penelitian sebelumnya, dan memungkinkannya untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Melihat Gambar 1, terlihat kepadatan cluster yang dibedakan

oleh warna yang berbeda dari setiap cluster.



Gambar 1. Hubungan tema dalam Perencanaan Politik Perkotaan

Identifikasi dalam bentuk pemetaan pada Gambar 1 dapat membantu peneliti khususnya yang baru memulai penelitiannya dari awal. Ketika mereka menemukan topik yang menarik di bidang tertentu, yang mereka ingin tahu, mereka dapat membaca artikel yang berkaitan dengan topik itu dengan bantuan studi ini. Pada Cluster 1, konsep terkait adalah pengelolaan Perencanaan Politik Perkotaan Perhatian, kota, komunitas, politik, tempat, kekuasaan, relasi, penduduk, ruang, negara dan pekerjaan, Sedangkan Cluster 2 menekankan pada konsep wilayah, manfaat, negara, pembangunan, lingkungan, dampak, implementasi dan populasi. Dalam kasus Klaster 3, konsep ditujukan untuk konsep, tata kelola, pemerintah, pemangku kepentingan dan keberlanjutan. Bagi peneliti yang ingin membahas tema Perencanaan Politik Perkotaan, clustering ini akan membantu menganalisis konsep apa saja yang terkait. Misalnya, ketika peneliti memilih cluster 2, maka titik awal yang

perlu dijadikan body literature adalah konsep Perencanaan Politik Perkotaan. Selain itu, peneliti juga dapat mencari literatur terkait di pengelola referensi, dengan kata kunci yang termasuk dalam kategori cluster 2 yaitu wilayah, manfaat, negara, pembangunan, lingkungan, dampak, implementasi dan populasi.

Gugus	Nama kelompok	Total
Cluster 1	Perhatian, Kota, Komunitas, Politik, Tempat, Kekuasaan, Relasi, Penduduk, Ruang, Negara dan Pekerjaan	11
Cluster 2	Wilayah, manfaat, negara, pembangunan, lingkungan, dampak, implementasi dan populasi.	8
Cluster 3	Tata kelola,pemerintah,pemangku kepentingan dan keberlanjutan	3

Pada Klaster 1 menunjukkan bahwa terdapat tema dominan yang dibahas karena menjadi dasar bahas dalam tulisan ini. Kota menjadi sarana bagi pemangku kepentingan untuk menuangkan tujuan politik tertentu dan masyarakat sebagai orang-orang yang bermukim di dalam wilayah kota yang juga memiliki kepentingan tertentu. Politik menjadi point dasar dalam kelompok tema di dalam klaster 1. Paradigma konsep kota dan kebijakan kota saat ini haruslah setara, Kota yang adil adalah kota yang mampu menyediakan kesempatan bagi seluruh penduduknya berupa perumahan bukan hanya untuk perumahan elit demi kepentingan peringkat layak huni (Cramer-Greenbaum, 2021). Dewasa kini juga, Kota-kota besar terus berusaha memperbaiki dan mencari inovasi terkait ekosistem manusia dan memberikan banyak layanan kepada warganya. Salah satu penyebabnya adalah urbanisasi, proses urbanisasi dan peningkatan jumlah penduduk di kota-kota memberikan dampak

tekanan bagi layanan kota dan infrastruktur (Mozūriūnaitė & Sabaitytė, 2021).

Klaster 2 menunjukkan bahwa pembangunan adalah tema dominan dalam klaster ini, pembangunan perkotaan adalah sebuah refleksi bahwa terdapat upaya-upaya untuk meningkatkan kemajuan baik segi sumber daya manusia, ekonomi, pelayanan publik dan sebagainya. (Masik et al., 2021) telah mengkaji bahwa kota-kota di Polandia yang telah menerapkan strategi Smart City, berangkat dari keinginan untuk mengubah kelembagaan dengan tata kelola yang partisipatif, layanan yang terdigitalisasi, penanganan kebutuhan sosial dan konsepkan agenda besar dengan tujuan pembangunan perkotaan yang lebih luas dan mereka juga telah menggabungkan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan demi mendapatkan citra yang positif. kebutuhan kota-kota di seluruh dunia bukannya hanya sistem pelayanan publik yang modern saja. Namun, Perlu memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam penelitian (Norizan et al., 2021) Perubahan iklim dan tekanan pembangunan berdampak meningkatnya bahaya banjir dan hal inilah mendorong untuk menciptakan langkah-langkah untuk pengurangan banjir dalam rencana pembangunan. Maka dari itu, Penguatan ketahanan dari bencana banjir dalam perencanaan pembangunan tidak hanya untuk mencegah resiko tetapi juga untuk kerentanan serta menanamkan rasa kesiapsiagaan dalam respon bencana banjir dengan lebih baik oleh pemerintah dan masyarakat. Di Malaysia upaya mitigasi banjir menjadi agenda yang baru-baru ini diserukan karena resiko banjir sangat rentan di negara ini, Langkah-langkah pengurangan banjir telah menjadi kunci

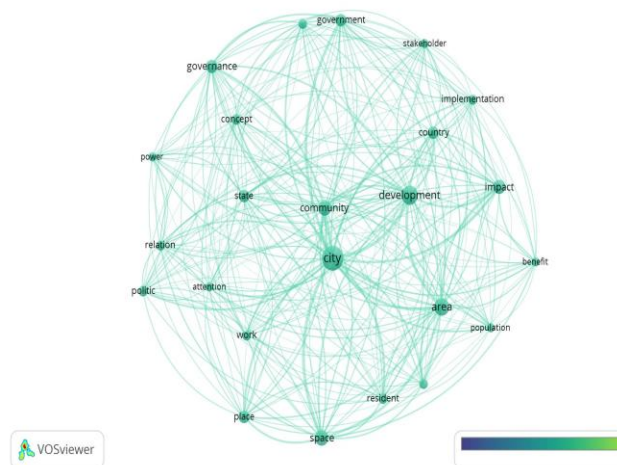
dalam rencana pembangunan Malaysia. Namun, Sedikit yang diketahui tentang jangkauan yang terintegrasikan dalam rencana pembangunan lokal yang menjadi rencana pembangunan, Menurut undang-undang yang menjadi keputusan pengendalian perencanaan dan memungkinkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi.

Klaster 3, Pemerintah daerah sebagai suprastuktur politik lokal merupakan pihak yang menjadi pihak utama dalam upaya pembangunan perkotaan selain sebagai pelaksana, pemerintah berperan dalam merangkul seluruh elemen perkotaan. Bagi (Lee & Feiock, 2021) terdapat empat peran yang mesti diperankan oleh pemerintah daerah dalam sisem pemerintah kontemporer-minimalis, agen pelaksanaan, pengusaha dan juara regional. Peran-peran ini dikembangkan berdasarkan rentang waktu dan kapasitas di mana pemerintah daerah tersebut beroperasi. Di dalam ranah publik keterlibatan sipil juga penting dalam penyusunan konsep perencanaan perkotaan, dalam kajian (Gao & Teets, 2021) menemukan bahwa Green Zhejiang, organisasi masyarakat sipil mampu mengarahkan pemerintah daerah terkait tata kelola lingkungan yang inklusif dengan menggunakan kekuatan informal untuk mengintervensi pertanggungjawabn pemerintah daerah berdasarkan dua strategi yaitu memobilisasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi mengenai pencemaran air dan memanfaatkan kewenangan pemerintah regional untuk menemukan solusi yang terkonsentrasi kepada warga. Green Zhejiang bertindak secara informal, membatasi efektivitas jangka panjang. Partisipasi warga yang lebih dilembagakan sangat diperlukan

untuk mengembangkan solusi inovatif terhadap degradasi lingkungan yang buruk di Cina.

1.1 Tema Dominan dalam Studi Perencanaan Politik Perkotaan.

Frekuensi Kata, mengeksplorasi kata-kata yang paling sering muncul dalam data penelitian. Oleh karena itu, dengan alat analisis ini, kata-kata yang memiliki arti yang sama dapat dikategorikan dalam satu kelompok. Berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari 96 artikel, tema dominan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya adalah pembangunan, tata kelola, pemerintahan, lingkungan dan wilayah. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa inilah keseluruhan fokus penelitian yang berkaitan dengan topik ini. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada (Gambar 2), terutama pada kata-kata yang dicetak tebal.



Gambar 2. Tema dominan dalam studi perencanaan politik perkotaan.

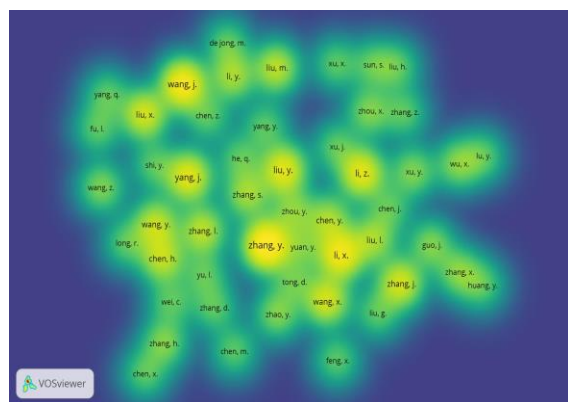
Berdasarkan hasil temuan VOSviewers, Aplikasi yang digunakan oleh penulis dalam mengkategorisasikan konsep dominan. Adapun beberapa konsep terkait perencanaan politik perkotaan diantaranya

City, Development, Area, Impact, Community, Space, Governance, Government, State, Politic, Relation, Power, Concept, Country, Implementation, Benefit, Population, Resident, Politic, Work, Attention, Relation dan Stakeholder. Distingsi memiliki sisi ketebalan warna yang variatif, Perbedaan ketebalan warna tersebut mengartikan bahwa kelompok topik yang memiliki ketebalan warna merupakan topik yang dominan dan masif dibahas mengenai perencanaan politik perkotaan oleh beberapa author terdahulu.

Berdasarkan konsep dominan dalam studi mengenai perencanaan politik perkotaan ini, ditemukan bahwa terdapat topik yang cukup mendominasi (berdasarkan ketebalan warna). Topik dominan pertama adalah City (Kota). Maka dari itu, Mengartikan bahwa Kota merupakan aspek mendasar dalam perencana politik perkotaan ini. Topik dominan lainnya ialah Development (Pembangunan), Perencanaan politik perkotaan bertujuan untuk melaksanakan pembangunan dari segala aspek yang baik bagi masyarakat baik dari segi pelayanan publik, lingkungan maupun sumber daya manusia penduduknya. Terakhir ialah Impact (Dampak), Upaya pembangunan perkotaan tentu akan berdampak bagi masyarakat yang akan menikmati hasil pembangunan yang dicanangkan dan bagi pemerintah kepercayaan publik atas kebijakan maupun upaya pembangunan yang telah mereka buat dan juga melibatkan masyarakat sipil dalam proses perencanaan pembangunan tersebut merupakan hal yang paling berharga karena kepercayaan publik akan melahirkan siklus demokrasi yang baik antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

1.2 Pemetaan Author Dalam Studi Perencanaan Politik Perkotaan

Adapun beberapa author yang menjadi penulis dari pelbagai tulisan ilmiah mengenai Perencanaan Politik Perkotaan. Persis dengan sistematis yang berdasarkan hasil analisis data yang bersumber dari 96 artikel dari tema dominan yang diteliti oleh peneliti sebelumnya diatas. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa inilah keseluruhan author yang berkaitan dengan topik Perencanaan Politik Perkotaan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada (Gambar 3), terutama pada author-author yang dicetak tebal dan pengklasifikasian atau kategorisasi berupa tabel dari keseluruhan author.



Gambar 3. Pemetaan Author berdasarkan penelitian terdahulu

Tabel 2 Pengelompokan Author Dalam Studi Perencanaan Politik Perkotaan.

Cluster	Nama Author	Jumlah
Cluster 1	Chen,y, Feng,x, Li,x, Liu, y, Tong, d, Wang,x, Yuan,y, & Zhou,y.	8 Item
Cluster 2	Gou,j, Huang,y, Li,z,Liu,g, Zhang, j, Zhang, x & Zhao,y.	7 Item
Cluster 3	Liu, h, Liu,m, Sun, m, Xu, J, Xu, x, Zhang,z & Zhou, x.	7 Item
Cluster	Chen,j, Liu,l, Lu,y, Wu,x, Xu, y, & Zhang,y.	6 Item

4		
Cluster 5	Chen,h, Long,r Shi,y, Wang,y, Yang,j, & Zhang,l.	6 Item
Cluster 6	Chen,z, De Jong, m, He,q, Li,y, Yang,y & Zhang,s.	6 Item
Cluster 7	Chen,m, Chen,x, Yu,l, Zhang,d, & Zhang,h.	6 Item
Cluster 8	Fu,l, Liu,x, Wang,j, Wang,z & Yang,q.	5 Item

Berdasarkan gambar diatas maka dapat diketahui bahwa topik yang menjadi pusat perhatian. Semakin terang warna yang ada maka itu adalah tema yang paling sering didiskusikan. Berdasarkan tema yang berkaitan dengan perencanaan politik perkotaan terdapat beberapa tulisan yang telah relevan dengan studi penelitian mengenai perencanaan politik perkotaan. Dalam pemetaan Author ini, terdiri dari 1 Cluster yang di dominasi oleh Zhang,y. Karena dalam pemetaan gambar diatas, menunjukkan Zhang,y. berada pada titik pusat Cluster yang artinya artikel dari Zhang,y. Memiliki keterkaitan topik atau tema dengan Author lainnya. secara menyeluruh dari 1 cluster, author yang paling dominan pada penelitiannya adalah tidak ada. Karena 51 author mempunyai kedudukan yang sama/dominan dalam melakukan penulisan artikel dengan membahas tema Perencanaan Politik Perkotaan.

Penutup

Proses dan praktik perencanaan politik perkotaan tidak terlepas dari cengkraman kepentingan individu maupun kelompok tertentu, Seringkali dalam proses tersebut kita menemukan tindakan amoral yang dilakukan oleh pemangku kepentingan maupun pemerintah. Katakanlah Korupsi, Gratifikasi, perusakan lingkungan yang

dihasilkan dari proses pembangunan perkotaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh pihak terkait maupun dari masyarakat sipil itu sendiri.

Di era modern ini, Ambisi pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang modern cenderung terburu-buru karena tidak memprioritaskan apa yang menjadi penunjang dari pelayanan publik yang modern tersebut kepada masyarakat seperti ketersediaan internet bagi masyarakat dan mengasah sumber daya manusia di dalam lembaga pelayanan publik itu sendiri maupun masyarakat agar lebih cakap dalam menggunakannya. Selain itu, perhatian pemerintah terhadap lingkungan juga penting karena pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi maupun tempat tinggal akan mengancam lingkungan perkotaan. Kesehatan masyarakat pun akan terancam untuk mensiasati hal demikian diperlukanlah kebijakan dan konsep tata kelola yang menunjang kesehatan masyarakat baik berupa fasilitas kesehatan, taman dan sebagainya

Substansi dari tugas dan fungsi pemerintah adalah mengutamakan masyarakat, Pemerintah wajib untuk mengesampingkan kepentingan pribadi maupun kelompok yang dapat mengganggu apalagi melakukan tindakan kejahatan tertentu dari oknum-oknumnya atau pihak-pihak yang bergabung dalam suatu perencanaan politik perkotaan ini. Pemerintah perlu menyesuaikan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat sipil terlebih dahulu setelah itu pihak-pihak lain. Bonus dari pendekatan demokratis tersebut akan membuahkan public trust dari masyarakat dan ini adalah nilai yang paling berharga bagi pemerintah.

Daftar Pustaka

- Audikana, A. (2021). Is planning still political? The politicization of high-speed rail in Spain (1986–2016). *Political Geography*, 84. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102269>
- Brazeau-Béliveau, N., & Cloutier, G. (2021). Citizen participation at the micro-community level: The case of the green alley projects in Quebec City. *Cities*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103065>
- Bush, J., Ashley, G., Foster, B., & Hall, G. (2021). Integrating green infrastructure into urban planning: Developing melbourne's green factor tool. *Urban Planning*, 6(1), 20–31. <https://doi.org/10.17645/UP.V6I1.3515>
- Chung, C. K. L., & Xu, J. (2021). Scalar politics of urban sustainability: Governing the Chinese city in the era of ecological civilisation. *Transactions of the Institute of British Geographers*. <https://doi.org/10.1111/tran.12436>
- Cramer-Greenbaum, S. (2021). Who can afford a 'livable' place? The part of living global rankings leave out. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 13(1), 70–82. <https://doi.org/10.1080/19463138.2020.1812076>
- Dudzic-gyurkovich, K. (2021). Urban development and population pressure: The case of młynówka królewska park in Krakow, Poland. *Sustainability*

- (Switzerland), 13(3), 1–26.
<https://doi.org/10.3390/su13031116>
- Everard, M., Kass, G., Longhurst, J., zu Ermgassen, S., Girardet, H., Stewart-Evans, J., Wentworth, J., Austin, K., Dwyer, C., Fish, R., Johnston, P., Mantle, G., Staddon, C., Tickner, D., Spode, S., Vale, J., Jarvis, R., Digby, M., Wren, G., ... Craig, A. (2021). Reconnecting society with its ecological roots. *Environmental Science and Policy*, 116, 8–19.
<https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.11.002>
- Gao, X., & Teets, J. (2021). Civil society organizations in China: Navigating the local government for more inclusive environmental governance. *China Information*, 35(1), 46–66.
<https://doi.org/10.1177/0920203X20908118>
- Grebosz-Krawczyk, M. (2021). Place branding (r)evolution: the management of the smart city's brand. *Place Branding and Public Diplomacy*, 17(1), 93–104.
<https://doi.org/10.1057/s41254-020-00167-2>
- Hartley, K. (2021). Public Trust and Political Legitimacy in the Smart City: A Reckoning for Technocracy. *Science Technology and Human Values*.
<https://doi.org/10.1177/0162243921992864>
- Hui, E. C.-M., Chen, T., Lang, W., & Ou, Y. (2021). Urban community regeneration and community vitality revitalization through participatory planning in China. *Cities*, 110.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.103072>
- Islam, J., Ali, M. J., & Mithun, S. (2021). Slums in India: making sense of place in urban planning. *GeoJournal*.
<https://doi.org/10.1007/s10708-020-10357-3>
- Jing, Y., Ma, D., Liu, Y., Cui, J., Zhang, S., & Chen, Y. (2021). Decoding the street-based spatiality of urban gyms: Implications for healthy city planning. *Land*, 10(2), 1–14.
<https://doi.org/10.3390/land10020175>
- Komninos, N., Kakderi, C., Mora, L., Panori, A., & Sefertzi, E. (2021). Towards High Impact Smart Cities: a Universal Architecture Based on Connected Intelligence Spaces. *Journal of the Knowledge Economy*.
<https://doi.org/10.1007/s13132-021-00767-0>
- Kontokosta, C. E., & Hong, B. (2021). Bias in smart city governance: How socio-spatial disparities in 311 complaint behavior impact the fairness of data-driven decisions. *Sustainable Cities and Society*, 64.
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102503>
- Kourtis, K., Marinescu-Pele, M. M., Nijkamp, P., & Traian-Pele, D. (2021). Safe cities in the new urban world: A comparative cluster dynamics analysis through machine learning. *Sustainable Cities and Society*, 66.
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102665>
- Lee, R. E., & Feiock, R. C. (2021). Local Government Roles in Filling the Sustainability Policy Vacuum: Insights from Local Government Managers.

- State and Local Government Review*.
<https://doi.org/10.1177/0160323X20988896>
- Masik, G., Sagań, I., & Scott, J. W. (2021). Smart City strategies and new urban development policies in the Polish context. *Cities*, 108.
<https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102970>
- Matsler, A. M., Miller, T. R., & Groffman, P. M. (2021). The eco-techno spectrum: Exploring knowledge systems' challenges in green infrastructure management. *Urban Planning*, 6(1), 49–62.
<https://doi.org/10.17645/UP.V6I1.3491>
- Mondschein, J., Clark-Ginsberg, A., & Kuehn, A. (2021). Smart cities as large technological systems: Overcoming organizational challenges in smart cities through collective action. *Sustainable Cities and Society*, 67.
<https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102730>
- Mozūriūnaitė, S., & Sabaitytė, J. (2021). To what extent we do understand smart cities and characteristics influencing city smartness. *Journal of Architecture and Urbanism*, 45(1), 1–8.
<https://doi.org/10.3846/jau.2021.12392>
- Nahiduzzaman, K. M., Holland, M., Sikder, S. K., Shaw, P., Hewage, K., & Sadiq, R. (2021). Urban Transformation Toward a Smart City: An E-Commerce-Induced Path-Dependent Analysis. *Journal of Urban Planning and Development*, 147(1).
[https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)UP.1943-5444.0000648](https://doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000648)
- Norizan, N. Z. A., Hassan, N., & Yusoff, M. M. (2021). Strengthening flood resilient development in malaysia through integration of flood risk reduction measures in local plans. *Land Use Policy*, 102.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105178>
- Odendaal, N. (2021). Everyday urbanisms and the importance of place: Exploring the elements of the emancipatory smart city. *Urban Studies*, 58(3), 639–654.
<https://doi.org/10.1177/0042098020970970>
- Pietta, A., & Tononi, M. (2021). Re-naturing the city: Linking urban political ecology and cultural ecosystem services. *Sustainability (Switzerland)*, 13(4), 1–19.
<https://doi.org/10.3390/su13041786>
- Pineda-Pinto, M., Nygaard, C. A., Chandrabose, M., & Frantzeskaki, N. (2021). Mapping social-ecological injustice in Melbourne, Australia: An innovative systematic methodology for planning just cities. *Land Use Policy*, 104.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105361>
- Poelzer, G., & Yu, S. (2021). All trust is local: Sustainable development, trust in government and legitimacy in northern mining projects. *Resources Policy*, 70.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101888>
- Qin, X., & He, B. (2021). The politics of authoritarian empowerment: Participatory pricing in China. *International Political Science Review*.
<https://doi.org/10.1177/0192512120985511>